UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasaYunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat,suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Secara umum istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang kebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Budi Winarno (2008:16)

William N. Dunn (2003), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti, pertahanan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan kemasyarakatan, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Khoiri, 2013) Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan *(whatever government choose to do or not to do).* Dalam pengertian seperti ini maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakuakan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Miftah Thoha, 2010: 107)

Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama.Pertama, kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang emiliki maksud atau tujuan tertentu, kebijakan tidak bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran berorientasi pada tujuan.Kedua, kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang.Ketiga, kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang silmultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah. Keempat, kebijakan merupakan ‘apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah ‘ dan bukan ‘apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah’. Kelima, kebijakan publik bisa bersifat popular (pemberian insentif, pelaksanaan bantuan keuangan pada rakyat miskin dan lainnya) tetapi juga dapat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tidak popular (pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi dan sebagainya).Keenam, kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif.Untuk yang positif, kebijakan melibatkan tindakan untuk menangani suatu masalah, sedangkan yang negatif kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau mengerjakan apapun.Ketujuh, kebijakan didasrkan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. (Leo Agustino, 2016)

2.2.1 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses yang bersifat politis. Dalam pembuatan kebijakan terdapattahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijkan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik.Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan menurut Winarno (33-34) yaitu:

1. Penyusunan Agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilakukan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Pada tahap ini masalah di masukkan ke dalam agenda untuk dipilih. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan masalah mungkin ditunda pembahasannya atau mungkin tidak disentuh sama sekali. Masing-masing masalah yang di masukkan ke

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam agenda memiliki argumentasi masing-masing.Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap penyusunan agenda harus secara jeli melihat masalah-masalah mana saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah kebijakan sehingga dapat menemukan masalah kebijakan yang tepat.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah di masukkan dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan.Dari berbagai masalah yang ada tersebut di tentukan masalah mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak di jadiakan fokus pembahasan.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative yang di tawarkan, pada akhirnya akan diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakansebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tahap ini sering disebut juga tahap legitimasi kebijakan *(policy Legitimation)* yaitu kebijakan yang telah mendapat legitimasi, masalah yang telah di jadikan sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan di implementasikan.

4. Implementasi Kebijakan

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan.Pada tahap ini suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala.Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan.Hal ini disebabkan sebagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilahan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi.Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan di evakuasiuntuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, penilaian tidak hanya menilai implementasi dari kebijakan, namun lebih jauh akan menentukan perubahan terhadap kebijakan

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Bernadine R. Wijaya & Susiolo Supardo dalam (Harbani Pasolong, 200: 57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana dalam praktik. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikat pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan. (Budi Winarno, 2008: 144)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2008: 139) mendefenisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-47) mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakn operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organiasi public yang disarankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Solichin Abdul Wahab (2008: 65),mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van Meter dan Van Horn (Suharno, 2008 :176), mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:90)mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated)ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan,dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.
2. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan didukung sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:90) mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi bagi keberhasilan suatu program. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn Dan Van Mater dalam Agustinus (2006:91)apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity)dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, hal ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan seperti karakteristik partisipan dan elit poltik yang mendukung implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik. Oleh karenanya, dalam implementasi kebijakan akan berkaiatan dengan konsistensi pejabat pelaksana dengan keputusan kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi output dan dampak kebijakan serta melakukan formulasi kembali sesuai pengalaman lapangan. Atas dasar itu, kemudian dinamika implementasi sangat dipegaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkait satu dengan lainnya.

6. Disposisi implementor yang mencakup 3 hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:94) ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan *(befiltered)* lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan *(cognition),* pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding)terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak *(acceptance, neutrality, and rejection)* dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors)terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance)kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

2.3 Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)

Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A Setara SD, paket B setara SMP/MTS, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat yang belum menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan masyarakat yang membutuhkan.

Pendidikan non formal merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal.Pendidikan nonformal memberikan berbagai pelayanan pendidikan bagi setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Program pendidikan non formal dapat diklasifikasikan atas dasar sasaran, jenis program, dan lembaga penyelenggara. Atas dasar sasaran, program pendidikan non formal dapat diklasifikasi menurut karakteristik calon peserta didik seperti latar belakang pendidikan, tingkatan usia, jenis kelamin, lingkungan tempat tinggal, serta latar belakang sosialnya. (Istianah, 2017)

Kebijakan pemerintah dibidang pendidikan sangat banyak diantaranya Peraturam Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 ”Tentang standar proses pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, program paket C”. Pada pasal 1 berbunyi ” Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran”.

2.4 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat.PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (*Community Based Institution*).Terminologi PKBM dari masyarakat,berarti bahwa pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Keinginan itu datang dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses transformasional dan pembelajaran. Inisiatif ini dapat dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya PKBM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat kepada beberapa

anggota atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak lain di luar komunitas tersebut.

Peran pendidikan non formal sebagai salah satu jawaban atas ketidakberdayaan masyarakat dan tidak tersentuhnya mereka dalam menikmati dunia pendidikan formal. Pendidikan non formal sebagai bentuk program penguatan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan pembelajaran dan penilaian, penyediaan dan peningkatan keterjangkauan pembiayaan dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan, disamping dapat pula memecahkan masalah kemanusiaan yang mendesak atau meresahkan yang terjadi dalam masyarakat serta untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seutuhnya. (Irma Yuliyant, 2015)

2.5 Pandangan Islam Terhadap Pedidikan

Dalam Islam, pentingnya pendidikan tidak semata-mata mementingkan individu, melainkan erat kaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, agar manusia mampu menjalankan tanggungjawab dengan baik diperlukan sikap personalitas yang berkualitas dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal itu hanya dapat dipenuhi melalui proses pendidikan.

Al-Qur’an juga telah memperingatkan kepada manusia agar mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam (QS. Al Mujadalah 11) :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa setiap sesuatu yang telah diamanatkan maka harus pula dikerjakan atau dilaksanakan, seprti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 67 sebagai berikut:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧

Artinya: Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.(Al-Maidah ayat 67)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh **Erma Yuliyanti tahun 2015 Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan yang berjudul Implementasi Pembelajaran Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Tunas Mekar" Bagi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.** Dalam penelitian Erma Yuliyanti terdapat permasalahan kurang sosialisasi dan motivasi dari penyelenggara PKBM khususnya terhadap peserta PKBM Paket C, dan sulitnya menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran Paket C yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran, dan mengetahui faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran di PKBM Tunas Mekar Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang program pendidikan kesetaraan yang dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Erma Yuliyanti meneliti Implementasi Pembelajaran Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Tunas Mekar" Bagi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraa di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pusako Bersemi Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hasil penelitian Erma Yuliyanti menunjukkan bahwa meneliti Implementasi Pembelajaran Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar sudah berjalan dengan cukup baik, hanya saja masih ada warga binaan yang sama sekali tidak mau mengikuti pembelajaran, dan masih sulitnya menumbuhkan kesadaran anak didik tentang pentingnya pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh **Istianah tahun 2017 Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan yang berjudul Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Di Pkbm Bangun Karsa, Bangun Rejo Yogyakarta.** Permasalahan dalam penelitian Istianah yaitu kurangnya sarana dan parasarana dalam proses pembelajaran, dan kurangnya disiplin dari tutor. Tujuan dari penelitian Istianah yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket B yang meliputi proses pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket B di PKBM Bangun Karsa, kualitas hasil pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket B di PKBM Bangun Karsa, Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi lembaga penyelenggara maupun tutor dalam melaksanakan program Paket B di PKBM Bangun Karsa.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat permasalahan yang sama yaitu, kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran sehingga proses belajar mengajar kurang maksimal. Sedangkan perbedaannya, penelitian Istianah meneliti hanya Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Di Pkbm Bangun Karsa, Bangun Rejo Yogyakarta**,** dan peneliti melakukan penelitian menyeluruh tentang Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan di Pusat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kegiatan B elajar Pusako Bersemi Kecamatan Pusako Kecamatan Puskao Kabupaten Siak.

Kesimpulan dari penelitian Istianah Proses pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket B meliputi: materi yang diberikan secara teori dan praktek, metode yang digunakan lebih banyak ceramah dan Tanya jawab, media yang digunakan modul dan gambar, Evaluasi kegiatan pembelajaran meliputi evaluasi proses, harian dan semester Hasil pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket B adanya peningkatan kualitas peserta didik yang cenderung mengikuti proses paket B sesuai arahan tutor yaitu disiplin dalam hal penggunaan modul di dalam kelas dan saling bekerja sama serta persentase kelulusan peserta didik adalah 100%. Faktor Pendukung proses pelaksanaan Paket B meliputi kemauan pengelola dalam melaksanakan program kesetaraan Paket B, sarana prasarana, buku-buku diperpustakaan.

Penelitisn yang dilakukan oleh **Tri Rusikawati tahun 2010 Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik yang berjudul Efektivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Usaha Mulya Dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.** Dalam penelitian Tri Rusikawati terdapat permasalahan yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, kurang fasilitas atau sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian Tri Rusikawati yaitu Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pusat Kegiatan Belajar Msyarakat (PKBM) Usaha

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Mulya dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Kecamatan Cangkringan Sleman.

Kesimpulan dari penelitian Tri Rusikawati yaitu kualitas tenaga pengajar yang ada di PKBM (yang berasal dari masyarakat sekitar) masih berpendidikan rendah, sehingga harus mendatangkan dari luar lingkungan PKBM Usaha Mulya. Untuk sarana dan prasarana yang digunakan, ada beberapa peralatan belajaryang jumlahnya masih minim, sehingga perlu penambahan peralatan. Kendala dalam mencapai efektivitas PKBM dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Kecamatan Cangkringan berasal dari keterbatasan dana yang didapatkan dari pemerintah yang berupa bantuan proyek guna menyelenggarakan kegiatan pendidikan di PKBM. Keterbatasn dana tersebut berakibat pada terbatasnya penyediaan peralatan yang digunakan untuk belajar dan jumlah warga masyarakat yang dapat mengikuti program pendidikan di PKBM

Usaha Mulya, belum seluruh Kelurahann di Kecamatan Cangkringan tersentuh oleh bantuan pemerintah melalui PKBM Usaha Mulya.

2.7 Defenisi Konsep

Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk megadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Melalui konsep, penelitian diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya. Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Publik

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mengatasi suatu persoalan publik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar sesuai dengan tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

3. Pendidikan Kesetaraan

Merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A Setara SD, paket B setara SMP/MTS, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.

4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakan pembangunan dibidang sosial, ekonomi, dan budaya.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur unsur variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi indikator dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yaitu:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Program Pendidikan Kesetaraan

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan	1. Standar dan sasaran kebijakan	a) Standar kompetensi program b) Sasaran pelaksanaan program
	2. Sumber daya	a) Ketersediaan Guru b) Ketersedian financial
	3. Hubungan antar organisasi	a) Komunikasi dengan Dinas b) Komunikasi antar PKBM
	4. Karateristik agen pelaksana	a) Struktur birokrasi Pelaksana b) Pola-pola hubungan birokasi pelaksana
	5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi	a) Kondisi sosial pelaksanaan program b) Kondisi politik dan ekonomi pelaksanaan program
	6. Disposisi implementor	a) Respon implementor tentang program b) pemahaman implementor tentang program

Sumber: Van Meter dan Van Horn (Suharno, 2008: 176)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan yang menggambarkan kejelasan penelitian secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2.2 Kerangka Berpikir

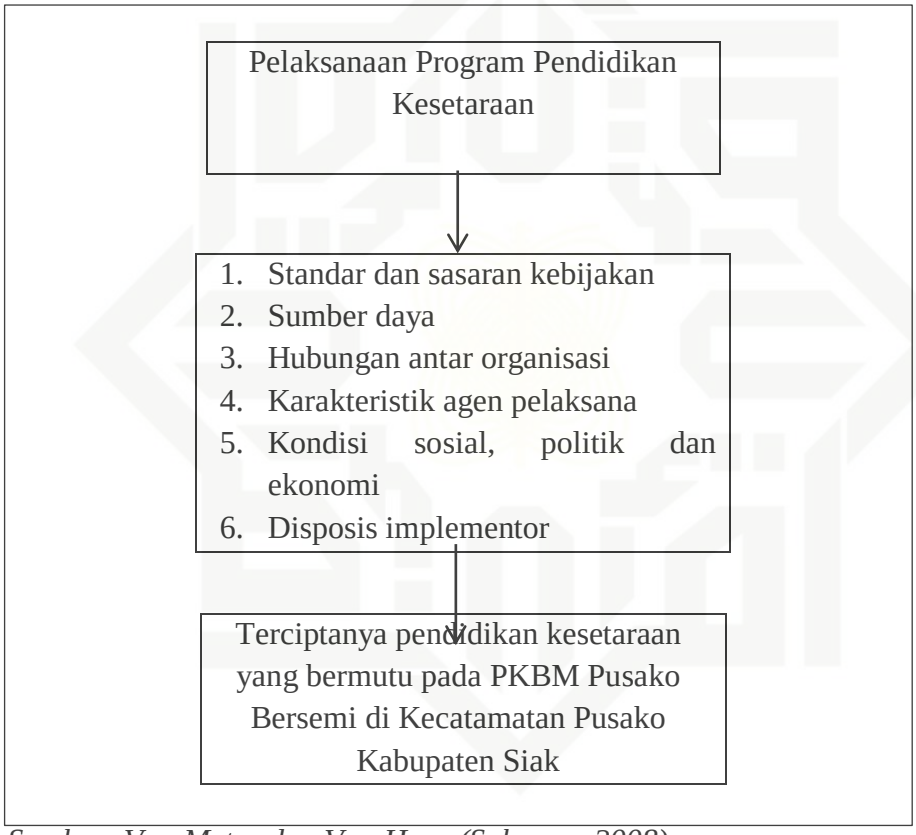

Sumber: Van Meter dan Van Horn (Suharno. 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU